

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan yang dikenal dengan nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM ini memberikan bantuan pada pemerataan penghasilan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya memiliki opsi untuk melakukan program dukungan dan penguatan pembangunan bagi UMKM. Kegiatan usaha ini, juga dapat dikelola oleh perorangan, kelompok, keluarga maupun masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Zahra, 2022). Sedangkan menurut Setyawati dan Hermawan (2018) menjelaskan bahwa UMKM adalah suatu kegiatan yang beralih dalam beraneka macam bidang usaha misalnya usaha pertanian, jasa, perdagangan, dan industri.

Di Indonesia, keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan atau dihindari oleh masyarakat, karena selain dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat, juga dapat mewujudkan daya cipta masyarakat sesuai dengan upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budayanya setempat. Disisi lain, karena besarnya jumlah penduduk di Indonesia, UMKM memiliki kapasitas untuk menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan, untuk perkembangan UMKM sangatlah strategis dalam menggerakkan perekonomian negara, mengingat kegiatannya hampir mencakup seluruh cabang perekonomian, sehingga kontribusi UMKM terhadap peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah sangatlah tinggi (Nuvitasari, *et al.*, 2019).

Sejak tahun 2018, perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang selalu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen. Pada tabel 1.1. di bawah, menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah UMKM yang terdapat di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur berjumlah sebanyak 3.753 pelaku UMKM yang terdiri dari, 2.475-unit UMKM yang berindustri makanan atau minuman, dan 895-unit usaha toko/warung kelontong, serta industri kecil dan mikro non pertanian yang berjumlah sebanyak 383-unit UMKM.

Tabel 1. 1

Jumlah UMKM Kecamatan Jombang Tahun 2021

Kategori	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
Usaha Kuliner	1. Industri Makanan	2.348
	2. Industri Minuman	127
	Total UMKM	<u>2.475</u>
Usaha Toko	1. Industri Toko atau Warung Kelontong	895
Usaha Non Pertanian	1. Industri Pakaian	88
	2. Industri Gerabah / Keramik	43
	3. Industri Anyaman	15
	4. Industri Tembakau	01
	5. Industri Percetakan	50
	6. Industri Kerajinan	22
	7. Industri Reparasi	20
	8. Lainnya	03
	Total UMKM	<u>383</u>
Total Keseluruhan UMKM Jombang		3.753

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (podes) 2021

Menurut data KEMENKOM, besaran UMKM di Indonesia pun kian bertambah di tahun 2022 yaitu mencapai 64,7 juta. Akan tetapi, dalam pengembangan bisnis bagi para pelaku UMKM. Terdapat beberapa hambatan, baik dari faktor internal atau eksternal. Menurut (jawapos.com, 2018), ketiadaan modal pinjaman untuk mengembangkan UMKM menjadi salah satu tantangan internal mereka. Pelaku UMKM sulit memperoleh modal pinjaman dari lembaga keuangan pemberi kredit sebab persyaratannya yang belum terpenuhi. Perusahaan harus mempunyai setidaknya laporan keuangan bisnis agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Laporan keuangan bukan hanya dipergunakan untuk memperoleh modal pinjaman, tetapi yang lebih krusial menurut perusahaan adalah manajemen mampu menggunakan laporan keuangan tersebut untuk dijadikan sebagai sumber informasi atau untuk mengevaluasi kemampuan kerja suatu usaha. UMKM dapat menentukan tingkat keberhasilan dan laba bersih usahanya berkat laporan keuangan. Selain itu, mereka juga dapat menentukan posisi keuangan perusahaan, untung atau rugi, dan peluang penghematan biaya. Namun, pentingnya pengelolaan keuangan seringkali diabaikan oleh para pelaku usaha tersebut. (Dewi & Sari 2019).

Pelaku UMKM harus memahami bagaimana sistem pencatatan akuntansi, apa yang harus disiapkan dan bagaimana menerapkan sistem akuntansi untuk mendapatkan laporan keuangan yang memadai, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengembangan usaha. Mengingat situasi dan kondisi pelaku usaha yang rendah akan ilmu pengetahuan Dasar Akuntansi, dan tingkat pendidikan mereka yang belum memenuhi syarat, dan terdapat sebuah pemikiran dari pengelola usaha bahwa pencatatan itu tidak penting untuk dilakukan. Maka,

perlu adanya inovasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Rachmanti, *et al.*, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Berkenaan dengan laporan keuangan EMKM, DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyusun dan mengesahkan suatu standar pelaporan keuangan yang khusus bagi pelaku UMKM pada tahun 2016, yaitu SAK EMKM yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan maksud membantu mengisi keperluan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah yang termaksud dalam definisi dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008. Dan di Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan bagi pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kalsum, *et al.*, 2020).

Karena masih banyak pelaku bisnis yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, dan komprehensif, serta sadar akan pentingnya dan manfaatnya suatu usaha melakukan pelaporan keuangan usahanya, maka dibuatlah SAK EMKM. Karena pada dasarnya, laporan keuangan adalah instrumen penting bagi kegiatan usaha dalam melaporkan seluruh aktivitas bisnis usahanya. Dalam SAK EMKM, para pelaku usaha harus membuat tiga jenis laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). SAK EMKM juga merupakan standar pelaporan yang tidak mempunyai akuntabilitas, dengan menggunakan standar ini sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan usaha, pelaku usaha akan mampu mendapatkan

dana pinjaman (modal) berupa KUR kepada pihak pemberi kredit untuk mengembangkan usahanya (Hetika & Mahmudah, 2017).

Trisomantagani, *et al*, 2017 menjelaskan bahwa meskipun menggunakan SAK EMKM untuk membuat laporan keuangan tampaknya lebih sederhana daripada standar keuangan lainnya, akan tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah itu karena diperlukan pemahaman yang cukup bagi pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM untuk proses pelaporan keuangan usahanya. Apalagi kesiapan dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan masih dalam kategori rendah dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Maka dari itu, penelitian ini mengharapkan agar UMKM di seluruh Indonesia dapat menambah ilmu dan wawasannya akan pentingnya melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik yang sesuai dengan SAK EMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmiyanti (2022) menunjukkan bahwa pengelola UMKM yang tercatat di Kota Cilegon Kabupaten Purwakarta memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangannya, namun kesiapan pelaku usahanya dalam menerapkan SAK EMKM pada penyajian laporan keuangan dalam kategori tidak siap. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sari (2019) menunjukkan bahwa hampir seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki pemahaman terkait dengan menerapkan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan dan telah siap serta dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan Sholikin & Setiawan (2018) dalam penelitiannya menyatakan adanya faktor yang menjadi kendala kesiapan pelaku UMKM di Kabupaten Blora dalam menerapkan SAK EMKM, diantaranya rendahnya kesadaran akan

pentingnya laporan keuangan untuk bisnis usahanya, dan belum terdapat sosialisasi, dan pelatihan mengenai SAK EMKM.

Perubahan pencatatan dari secara manual ke digitalisasi tersebut sangat diharapkan agar proses bisnis mereka dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mengingat di era globalisasi sekarang ini pertarungan bisnis kian padat, sehingga mendorong pelaku UMKM khususnya di Indonesia untuk mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang semakin modern ini. Ratiyah, *et al.*, 2021 menjelaskan bahwa pelaku UMKM diharapkan mampu menciptakan strategi bisnis yang efektif supaya dapat meningkatkan daya saing. Hal tersebut juga sependapat dengan penelitian Christianingrum, *et al.*, 2021 bahwa pelaku UMKM akan memiliki keunggulan bersaing yang lebih besar jika memiliki kapasitas inovasi yang lebih tinggi.

Pendapat ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa UMKM di Indonesia harus beradaptasi dengan era digitalisasi. Akan tetapi, mayoritas pelaku usaha melakukan pencatatan laporan keuangan hanya untuk mengetahui total pemasukan dan pengeluaran saja serta keuntungan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis kurang ilmu pengetahuannya mengenai pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM dan penggunaan program digitalisasi dalam menyusun laporan keuangan, mengingat tingkat pendidikan dari pelaku UMKM tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengetahuan para pengelola UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, serta mengukur tingkat kesiapan para pelaku UMKM untuk menunjang usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai pengetahuan penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi bagi pelaku UMKM di Kecamatan Jombang masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan SAK EMKM terhadap penyusunan laporan keuangan.

Untuk itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaku UMKM Jombang sudah melakukan pembukuan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku untuk usahanya?
2. Bagaimana Kesiapan pelaku UMKM Jombang dalam membuat laporan keuangan dan digitalisasi laporan keuangan sesuai SAK EMKM?
3. Bagaimana Pengetahuan pelaku UMKM Jombang dalam membuat laporan keuangan dan digitalisasi laporan keuangan sesuai SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaku UMKM Jombang sudah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dengan baik.
2. Untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM Jombang terhadap penyusunan laporan keuangan dan digitalisasi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui pengetahuan para pelaku UMKM Jombang terhadap penyusunan laporan keuangan dan digitalisasi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan adanya penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait teori akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan perkembangan teknologi.
- b. Dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pelaku UMKM, para peneliti, dan mahasiswa, serta pihak-pihak yang memerlukan penelitian ini sebagai referensi mengenai pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM yang berlaku.
- c. Sebagai bukti empiris ilmiah mengenai pentingnya pemahaman dan kesiapan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan terhadap suatu usaha bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pentingnya melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku pada usaha bisnisnya, dan pentingnya teknologi dalam proses daya saing ekonomi. Secara khusus juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha yang nantinya dapat berguna sebagai bahan evaluasi kinerja.

b. Civitas Akademika

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya atau dimungkinkan untuk diterapkan guna mencari

solusi bagaimana pelaku UMKM memiliki pengetahuan akan pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk usaha mereka serta kesiapan mereka dalam membuat laporan keuangan menggunakan teknologi informasi.

c. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan pandangan bagi pemerintah guna untuk memberikan bantuan kebijakan yang tepat agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.